



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Pemberitaan *International People's Tribunal 1965* oleh CNN
Indonesia

Skripsi

Oleh

Trifitri Muhammaditta

2013330012

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Pemberitaan *International People's Tribunal 1965* oleh CNN
Indonesia

Skripsi

Oleh

Trifitri Muhammaditta

2013330012

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Trifitri Muhammaditta
Nomor Pokok : 2013330012
Judul : Pemberitaan *International People's Tribunal 1965* oleh CNN
Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
pada Rabu, 10 Januari 2018
dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si.

:

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe, Drs., M.S.

:

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Trifitri Muhammaditta

NPM : 2013330012

jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

judul : Pemberitaan *International People's Tribunal 1965* oleh *CNN Indonesia*

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun, karya atau pendapat pihak lain yang dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila diketahui pada kemudian bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung,



Trifitri Muhammaditta

ABSTRAK

Nama : Trifitri Muhammaditta
NPM : 2013330012
Judul : Pemberitaan *International People's Tribunal 1965* oleh *CNN Indonesia*

Tragedi 1965 tidak pernah secara gamblang didiskusikan. Gerakan 30 September atau Gestapu atau sering dikenal dengan G30S/PKI adalah sebuah gerakan kudeta yang tidak jelas siapa dalang dibalikinya, meskipun peristiwa itu berlangsung 52 tahun lalu. *International People's Tribunal 1965* berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dibungkam oleh rezim Orde Baru sejak 1960-an. Melalui tribunal ini, Indonesia diharapkan akan mengusut dan menghilangkan impunitas yang sudah terjadi lebih dari setengah abad. Media internasional dan nasional mengulas seputar pengadilan rakyat yang dilaksanakan pada tahun 2015, termasuk *CNNIndonesia.com*. Penelitian ini melihat bagaimana pembingkaiian *CNNIndonesia.com* dalam mengulas berita mengenai tribunal tersebut.

Teori serta konsep yang digunakan adalah post-positivisme untuk menjelaskan keadaan fakta sejarah Gestapu yang multidimensional dan multiinterpretasi, serta *hyperreality* yang menunjukkan tidak ada realitas yang benar. Kemudian, konsep komunikasi internasional dan media baru digunakan untuk menjelaskan proses *CNNIndonesia.com* memperoleh dan menyebarkan berita yang dipaparkan. Sedangkan, analisis *framing* digunakan untuk memahami pembingkaiian berita yang dimuat.

Pada penelitian ini, ditemukan adanya indikasi bahwa *CNNIndonesia.com* memiliki ketertarikan khusus untuk membahas lebih jauh mengenai *International People's Tribunal 1965*. Hal itu pun terlihat dari pembingkaiian berita yang dilakukan oleh *CNNIndonesia.com* melalui beberapa perangkat *framing* pada analisis *framing* yang dikemukakan oleh Pan dan Konsicki.

Kata kunci: *Gestapu, International People's Tribunal 1965, kejahatan terhadap kemanusiaan, CNNIndonesia.com, Orde Baru, analisis framing, post-positivisme.*

ABSTRACT

Name : Trifitri Muhammaditta
NPM : 2013330012
Title : CNN Indonesia's Coverage on International People's Tribunal 1965

The 1965 tragedy has never been discussed explicitly to this day. The 30th September Movement or Gestapu or widely known as G30S/PKI is a coup attempt occurred 52 years ago whose culprit has hardly been discovered. International People's Tribunal 1965 attempted to raise awareness in the community concerning crimes against humanity committed in Indonesia by the so-called New Order regime since the 1960's. The tribunal hopes for Indonesia to investigate and eliminate impunity that has been going over half a century, moreover to apologize to all survivors and families. International and national media reviewed the tribunal took place in 2015, including CNNIndonesia.com. This research aims to analyse CNNIndonesia.com's framing on the tribunal.

Theory and concepts used in this research are post-positivism to explain the conditions and historical facts along the Gestapu events that are multidimensional and multi-interpretation, also hyperreality which denotes no real realities. Moreover, other concepts used are international communication and new media to explain the process of how CNNIndonesia.com retrieves and publishes its news. While framing analysis is used to understanding its news-framing.

Shown in this research, there is an indication that CNNIndonesia.com has a special interest to cover and examine further in regards to International People's Tribunal 1965. These are shown on news-framing done by CNNIndonesia.com through framing tools in Pan and Konsicki's framing analysis.

Keyword: *Gestapu, International People's Tribunal 1965, crimes against humanity, CNNIndonesia.com, New Order, framing analysis, post-positivism*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, penelitian yang berjudul “**Pemberitaan *Internatinal People’s Tribunal 1965* oleh *CNN Indonesia*” dapat terselesaikan. Penelitian ini disusun sebagai syarat menempuh jenjang sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.**

Pada skripsi ini, penulis memberikan beberapa fakta anyar mengenai tragedi 1965. Selain itu, terdapat beberapa kesaksian eks tahanan politik yang sempat dipenjara selama belasan tahun. Tragedi 1965 ditutupi dan dibiaskan oleh rezim Orde Baru sehingga hanya memberikan fakta sejarah yang didoktrin oleh pemerintah, bahkan media massa dikontrol dan diawasi. Namun, dengan adanya kemerdekaan pers, berekspresi, dan informasi yang lebih terbuka setelah reformasi, media massa dapat dengan lebih leluasa memberitakan kenyataan baru mengenai tragedi pasca Gestapu, termasuk dengan adanya IPT 1965.

Penulis pun menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesan sempurna. Maka, penulis berharap adanya kritik dan saran membangun yang sedianya diberikan, serta usulan demi perbaikan penelitian ini. Penulis menghaturkan permohonan maaf bila sekiranya terdapat kesalahan penulisan Juga, penulis mengharapakan karya ilmiah akan membawa manfaat bagi kemajuan pendidikan nantinya.

Bandung, Januari 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

“The things that are easy to do are also the things that are easy not to do. The more the pace of our lives speeds up, the greater the impact the simple gestures of life will have on those most deserving them. And near the very top of my list of simple gestures that have profound consequences is the lost art of writing thank-you notes.”

Dari buku kecil Robin Sharma yang sudah kekuningan itu, mata ini membaca satu paragraf yang –entah mengapa– rasanya menyentil sanubari. Sejenak teringat, hidup ini tidak akan berarti tanpa tangan-tangan-di-atas yang menarik tangan yang selalu menengadahi ini. Karena Yang Di Atas akan selalu memberikan berkat-Nya, bahkan dalam hati pun, Ia selalu tahu bahwa manusia ini selalu berterima kasih. Ia pun tahu bahwa manusia ini akan selalu menyatukan kedua tangannya dan berucap *‘hatur nuhun’* kepada kedua orang tua yang sudah tidak tergapai oleh ruang dan waktu. Walakin tak ada, seorang mahaguru Giandi Kartasmita, M.A. membimbing manusia ini sampai titik. Tak ada ekspresi yang bisa ditunjukkan untuk rasa terima kasih yang menggunung setinggi Anjani ini.

Apa daya manusia ini tanpa *CNNIndonesia.com* dan *CNN Indonesia TV*? Durian runtuh yang datang pada tahun monyet itu memberi kesempatan emas pada manusia kerdil ini untuk bertemu dengan para penyintas sepuh nan gelora, sejarawan, dan yayasan IPT 1965. Namun satu yang pasti, terima kasih itu akan selalu dilayangkan untuk pemimpin redaksi *CNNIndonesia.com* Yoko Sari, mantan wartawan *CNNIndonesia.com* Anggi Kusumadewi, serta wartawan *CNNIndonesia.com* Yuliawati dan Prima Gumilang yang senantiasa mendampingi manusia –yang ingin menjadi seperti kalian– ini selama menulis dan menerjemahkan lembaran demi lembaran digital IPT 1965. Bahkan, terima kasih ini pun harus berlanjut kepada sang Ketua *Steering Committee* IPT 1965 Dolorosa Sinaga yang dengan gembira hati berbagi informasi berkenaan IPT 1965 sambil mengisap sebatang. Pun, para penyintas (utamanya, Pak Legimin, Pak Ngatemin, Pak Jatmiko, dan Pak Toto) yang masih gagah dalam usia senja dengan senang hati berbagi cerita selama ditahan di penjara, di ruangan yang kala itu pengap dengan gempita. Tanpa sang Prof. Bradley Simpson, manusia ini pun akan tetap berada di dalam kegelapan.

Tangan-tangan sepanji memberikan secangkir kopi hitam di pangkuan. Kopi itu manis, tidak pahit. Bukan karena gula, tapi karena kelakar yang tumpah. Tanpamu –Bella Datsi,

Dyaning Pangestika, Maulidya Yusliwan, dan Vanya Marieta Fasya, perempuan ini akan selalu meminum secangkir kopi hitam nan pahit dari bungkus kopi instan.

Dekat atau jauh tidak ada artinya, karena kawan adalah keluarga, begitulah *Ubud Writers and Readers Festival* dan Yayasan Mudra Swari Saraswati bagi manusia cilik ini sejak '15. Segala botol kelakar Orang Tua itu selalu dibalut dengan dorongan untuk menjadi 'seseorang'. *Near-far no matter, because friends are family. How I see yous. The Van Laarhovens gave this girl a chance to be in and with a family. No best friends should go through a 10-year friendship without meeting, only snail-mailing and cheering, but Oana-Iancu Gabriela had been. Life without Myriam Jach is unworthy, age is a number, but not wisdom. Emilie Pesch was sent down to Indonesia for all the good reason and never in this short life I will regret meeting this angel. ISWinT's summer gave this crumpled mind a breath. Pasta to eat and Sara Tealdi to meet; memes can be inspirational, as me's to her wheeze-all. Cannot express anything more to Nabil Dorn, Jamie Barker, Kristal Ang, and Thaqif Kamarul to have been the caramel in my coffee. Italy has pasta, and a daft unicorn to –virtually– cheer this girl up, is Giacomo Saroldi.*

Akhir adalah awal. Karena dunia adalah siklus. Tapi akhir tidak buruk, hanya baik. Terima kasih terakhir ini pun disimpan untuk seorang Fathin Naufal, sekelompok Rumah Ceria Ubud, seruangan Kantor Internasional dan Kerjasama Publikasi Unpar, se-Tim 1 Ekspedisi Nusantara Jaya Maluku Utara 2017 yang termasuk Desa Korago, Morotai Utara, dan sepaket Ni Putu Ayu Dharmayanti-Fadel Fauzan-Arya Narapati. Tak lupa Akbar Nurseptian, Yudha Trinugraha, dan Agung Graha Nur Adha untuk kopi malam menuju pagi sebelum sidang. Namun –seperti yang selalu disebutkan oleh semua orang sejagat raya dunia ini– *last but not least*, kepada Indah Syara Rahmani Gaos sebagai seorang sahabat sejak awal milenium yang tidak pernah lelah memberi secangkir kopi hitam manis.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.2.1. Pembatasan Masalah.....	9
1.2.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian	10
1.4. Studi Pustaka dan Kerangka Pemikiran	11
1.4.1. Studi Pustaka	11
1.4.2. Kerangka Pemikiran	13
1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	25
1.5.1. Metode Penelitian	25
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data	25
1.6. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	28
2.1. Gerakan 30 September	28
2.1.1. Sengkarut Fakta Dibalik Dalang Gestapu	32
2.1.1.1. Gestapu Adalah Masalah Internal Angkatan Darat	34
2.1.1.2. PKI Sebagai Kambing Hitam	36
2.1.1.3. Langkah PKI Merebut Kekuasaan	39

2.1.2. Hubungan Amerika Serikat dan Sekutu dengan Indonesia berikut Keterlibatannya.....	40
2.1.3. Indonesia sebagai <i>Proxy War</i> dalam Perang Dingin.....	43
2.2. Kejahatan Pasca Gestapu 1965.....	46
2.2.1. Kesaksian Penyintas Tahanan Politik	47
2.2.1.1. Kesaksian Legimin Dibui di Penjara Salemba dan Pulau Buru	47
2.2.1.2. Kesaksian Ngatemin Ditahan di Penjara Salemba	50
2.2.1.3. Kesaksian Jatmiko di Rutan Kebon Waru	51
2.2.2. Kesaksian Para Algojo	53
2.3. <i>International People’s Tribunal 1965</i>	57
2.3.1. Prosedur dan Yurisdiksi	60
2.3.2. Dakwaan IPT 1965 Kepada Indonesia.....	62
2.3.3. Laporan Juri	67
2.3.3.1. Struktur Pemeriksaan	68
2.3.3.2. Pernyataan Akhir Tribunal	68
BAB III.....	72
3.1. <i>CNN Indonesia</i> sebagai Media Pemberitaan Nasional.....	74
3.1.1. Kemerdekaan Berpendapat, Berekspreksi, dan Pers.....	76
3.1.2. Peran dan Tanggung Jawab Pers.....	78
3.1.3. Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Kode Etik Jurnalistik	80
3.2. Pandangan <i>CNNIndonesia.com</i> terhadap IPT 1965	82
3.3. Pembingkaiian Berita Teks Media Massa.....	95
BAB IV	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
Baperki	Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BKR	Badan Keamanan Rakyat
BTI	Barisan Tani Indonesia
CAH	<i>Crimes Against Humanity</i>
CC PKI	Central Komite Partai Komunis Indonesia
CGMI	Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia
CIA	<i>Central Intelligence Agency</i>
CPM	Corps Polisi Militer (kini, Polisi Militer Angkatan Darat)
FAKI	Forum Anti Komunis Indonesia
FDR	Front Demokrasi Rakyat
G30S	Gerakan 30 September
Gestapu	Gerakan September Tiga Puluh
Gerwani	Gerakan Wanita Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> atau Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
IJTI	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
IPT	<i>International People's Tribunal</i>
IRD	<i>Information Research Department</i>
ISDV	<i>Indische Social Democratische Vereeniging</i> atau Serikat Sosial Demokrat Hindia

Kopkamtib	Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Korem	Komando Resort Militer
Kostrad	Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
KSAD	Kepala Staf Angkatan Darat
Lipsus	Liputan khusus
Mahmilub	Mahkamah Militer Luar Biasa
Nasakom	Nasionalis, agama, dan komunis
NU	Nahdhlatul Ulama
Permesta	Pergerakan Rakjat Semesta
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
PRRI	Pemerintah Revolusi Republik Indonesia
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
RRI	Radio Republik Indonesia
SI	Sarekat Islam
Tjakrabirawa	Resimen Pengawal Presiden (kini, Pasukan Pengamanan Presiden/Paspampres)
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UWRF	<i>Ubud Writers and Readers Festival</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	17
Gambar 2	21
Gambar 3	53
Gambar 4	88
Gambar 5	89
Gambar 6	90
Gambar 7	91
Gambar 8	92
Gambar 9	93
Gambar 10	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ideologi menjadi suatu ciri dan merupakan suatu alat yang digunakan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita negara, juga dijadikan sebagai dasar falsafah negara. Ideologi digunakan untuk menggambarkan seperangkat nilai yang saling berkaitan yang bersifat ketat, komprehensif, dan dogmatis yang berdasarkan kepada suatu filosofi sistematis yang mengklaim akan memberikan jawaban koheren dan tidak dapat ditandingi untuk seluruh permasalahan manusia, baik masalah individual atau sosial: suatu filosofi dikodifikasi, dilindungi, dan diuraikan sebagai satu doktrin atas pernyataan atau tantangan.¹ Seluruh negara memiliki ideologinya masing-masing, termasuk Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negaranya. Contoh-contoh ideologi atau paham lainnya, yaitu liberalisme, fasisme, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya.

Ide-ide mengenai komunisme pertama kali diungkapkan oleh Karl Marx bersama dengan Frederick Engels yang ditulis pada sebuah pamflet berjudul ‘*The Communist Manifesto*’ pada tahun 1848.² Pemikiran ini muncul pada saat Revolusi Industri berlangsung di Eropa Barat yang mana kegiatan-kegiatan yang pada awalnya menggunakan tenaga manusia, mulai digantikan oleh mesin sehingga kaum buruh atau proletar menjadi terkucilkan. Pemikiran Marx dan Engels ini memiliki tujuan untuk

¹ Michael Howard, "Ideology and International Relations," *Review of International Studies* 15, no. 1 (1989): 1, <http://www.jstor.org/stable/20097162/>, diakses pada 7 Februari 2017.

² Suparmo et.al, *Komunisme di Indonesia*, ed. Saleh As'ad Djamhari (Jakarta: Pusjarah TNI, 2009), hal. 5.

meningkatkan derajat kaum proletar, yaitu dengan menyamaratakan seluruh kelas sehingga tidak ada perbedaan antara kaum borjuis dan kaum buruh. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa untuk menjadi masyarakat komunis, maka properti swasta atau kepemilikan pribadi harus dihilangkan karena akan menciptakan manajemen industri yang dikelola oleh pribadi dan memunculkan kompetisi sehingga harus ada suatu sistem yang mengelola seluruh cabang produksi yang dioperasikan oleh satu komunitas yang diperuntukkan kepada kepentingan umum, berdasarkan kepada rencana umum, dan adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat.³

Namun, komunisme dianggap sebagai paham yang ‘jahat’ atau ‘dilarang’ akibat konsepsi komunisme Marx yang direkonstruksi oleh Lenin dan Stalin pada masa pemerintahannya. Lenin ingin mempercepat proses terbentuknya masyarakat komunis. Komunisme pada masa Lenin itu melahirkan banyak praktik korupsi dan model pemerintahan satu partai dengan pemimpin diktator. Komunisme juga identik dengan munculnya pemberontakan kaum proletar. Di Indonesia, komunisme ‘dilarang’ oleh pemerintah, dianggap ‘jahat’, dan disangkutkan dengan ateisme. Ajaran komunisme dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama.

Komunisme masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1913 oleh seorang mantan Ketua Sekretariat Buruh Nasional dan mantan pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di Belanda bernama Hendricus Josephus Franciscus Maria Sneevliet yang bekerja sebagai

³ Frederick Engels, *Principles of Communism*, trans. Max Bedacht (Chicago: The Daily Worker Publishing Co., 1925), hal. 20-21.

staf redaksi *Soerabajasche Handelsblad* di Surabaya.⁴ Bersama dengan dua temannya, Sneevliet membentuk satu organisasi politik di Semarang yang dinamakan *Indische Social Democratische Vereeniging* (ISDV) atau Serikat Sosial Demokrat Hindia, Sneevliet dan kedua temannya menggunakan surat kabar *Het Vrije Woord* (Suara Kebebasan) untuk melakukan propaganda penyebaran paham *Marxisme*. Namun, karena gagal mendapatkan perhatian masyarakat, kemudian mereka mendekati Sarekat Islam yang anti-kapitalis. Oleh karena keberhasilannya mempengaruhi pimpinan Sarekat Islam (SI) Semarang, ISDV menjadi semakin kokoh dan mengganti namanya menjadi Perserikatan Komunis di Indie (PKI) pada tahun 1920, kemudian diganti menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) empat tahun kemudian.⁵

Pada tahun 1926 dan 1948, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda dan Indonesia pasca kemerdekaan. Pemberontakan tahun 1926 bertujuan untuk melancarkan revolusi terhadap pemerintah kolonial yang dilakukan oleh para buruh yang diawali dengan melakukan mogok kerja. Namun, pemberontakan dapat diredam dan ditumpas oleh pemerintah kolonial. Masyarakat yang berafiliasi kepada PKI, baik itu secara langsung sebagai anggota, simpatisan, atau keluarga ada yang dipenjara, dihilangkan nyawanya, disiksa, diasingkan, dan melarikan diri ke luar negeri.⁶ Pada tahun 1927, pemerintah Belanda menyatakan PKI sebagai partai dan organisasi terlarang.⁷ Pasca kemerdekaan Indonesia, PKI bangkit kembali karena tetap bergerak di bawah tanah.

⁴ J. TH. Petrus Blumberger, *De Communistische Beweging in Nederlandsch Indie* (Haarlem, 1935), hal. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ Hersri Setiawan, *Memoar Pulau Buru*, (Magelang: IndonesiaTera. 2004), hal. 7, 13, 31, 38-39, 51

⁷ *Ibid.*

Kembali terjadi pemberontakan pada tahun 1948 di kota Madiun, dimana PKI dan Front Demokrasi Rakyat (FDR) berusaha untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia. Akan tetapi, pemerintah merespons dan bertindak dengan cepat sehingga pemberontakan ini pun mampu ditanggulangi oleh Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), kemudian peran militer menjadi kian besar.⁸ Tidak seperti pada tahun 1927, PKI tidak dilarang dan tetap diperbolehkan untuk berfungsi setelah pemberontakan Madiun diredam.

Peran PKI dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di pemerintahan dan kancah politik cukup besar karena Presiden Soekarno memiliki kedekatan dan memberi simpati pada keduanya. Kejayaan PKI pada 1960-an ditandai dengan jumlah anggota yang mencapai 3.5 juta orang dan berdirinya organisasi-organisasi baru yang mampu menampung aspirasi masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), sehingga PKI mendapatkan simpati masyarakat.⁹ PKI dan ABRI tidak bisa disebut memiliki hubungan baik karena keduanya memiliki sejarah penuh konflik, yang mana pemberontakan PKI diredam oleh ABRI. Kekuatan PKI dan ABRI yang semakin besar di panggung politik, kedekatan Soekarno-PKI dengan gagasan nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom), hubungan yang saling benci dan saling curiga antara ABRI, yang diwakili oleh Angkatan Darat (AD), dengan Soekarno-PKI, dan isu adanya anggota ABRI tergabung dalam Dewan Jenderal yang bertujuan merebut kekuasaan negara itu menjadi bibit adanya Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu). Sampai dengan masa pemerintahan Jokowi-JK, latar belakang dan dalang Gestapu masih simpang

⁸ Ruben Nalelan, *Posisi ABRI dan KORPRI dalam Demokrasi Pancasila* (Tanpa kota: Upik dan Buyung, 1978), hal. 49.

⁹ Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hal. 33-34.

siur. Namun, sejak pergantian pemerintahan ke Orde Baru, PKI dituduh sebagai dalang dibalik Gestapu.

Gerakan 30 September atau G30S atau Gestapu adalah sebuah peristiwa penculikan dan pembunuhan enam perwira tinggi ABRI serta seorang letnan satu, yang diduga sebagai anggota Dewan Jenderal, pada tengah malam 30 September menuju 1 Oktober 1965 dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang Resimen Tjakrabirawa (sekarang menjadi Pasukan Pengaman Presiden/Paspampres) yang bertugas mengawal presiden. Aksi-aksi militer lainnya yang mendukung Gestapu juga terjadi di Jawa Tengah dan Yogyakarta, sedangkan di wilayah-wilayah lainnya tetap pasif walaupun sudah mengetahui adanya gerakan tersebut.¹⁰

Pada awal bulan Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto diberi kuasa oleh Presiden Soekarno untuk memulihkan ketertiban dan keamanan yang dilembagakan dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).¹¹ Tentara pun secara terang-terangan mulai menyalahkan PKI atas Gestapu meskipun PKI membantah keterlibatannya.¹² Ribuan aktivis, pemimpin, dan orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung berafiliasi pada PKI di pulau Jawa dan Bali ditangkap, diculik, dan dibunuh, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai “PNI kiri”.¹³ Pembunuhan massal ini tidak hanya dilakukan oleh militer, tetapi mendapat dukungan dari kelompok agama, seperti Muhammadiyah.¹⁴

¹⁰ John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hal. 77.

¹¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hal. 594.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Orang-orang yang ditangkap dan diculik dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi untuk diasingkan dan menjadi tahanan politik (tapol). Di dalam kamp konsentrasi itu, para tapol tidak hanya dipenjara, tetapi juga diinterogasi dan disiksa. Di beberapa kamp konsentrasi, bahkan makanan pun tidak disediakan sehingga tapol harus mencari makanannya sendiri, padahal dilarang keluar area tahanan.

Melalui sebuah film dokumenter berjudul “*The Act of Killing*” atau dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi “Jagal” garapan Joshua Oppenheimer, sebuah diskusi yang dihadiri oleh 35 eksil (warga negara Indonesia yang paspornya dicabut oleh pemerintah) dan salah satu topik bahasannya adalah bagaimana cara mengakhiri impunitas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pasca Gestapu.¹⁵ Meskipun pada tahun 2012 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memiliki cukup bukti berupa laporan bahwa ada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun pemerintah Indonesia tidak menindaklanjuti laporan tersebut dan tidak pernah dibahas lagi. Oleh sebab itu, para aktivis membentuk Pengadilan Rakyat Internasional 1965 (*International People’s Tribunal/IPT 1965*) sebagai desakan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengungkap kebenaran dan meluruskan sejarah.

Sidang digelar pada 10-13 November 2015 di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda pada peringatan 50 tahun Gestapu yang bertujuan untuk memperbaiki sejarah yang cenderung menyepelekan, menoleransi, menyisihkan, dan mengaburkan kejahatan-kejahatan pasca 30 September.¹⁶ Dakwaan yang disusun oleh seorang pengacara HAM terkemuka, yaitu Todung Mulya Lubis, dan tim penuntut, yaitu mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan

¹⁵ “Apa itu IPT 1965?” diakses pada 7 Februari 2017, <http://www.tribunal1965.org/id/apa-itu-ipt-1965/>.

¹⁶ *Ibid.*

yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, pembudakan, penahanan, kekerasan, penindasan, penculikan, penindasan lewat propaganda kebencian, dan keterlibatan negara lain dalam pelaksanaan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁷ Putusan pengadilan pada tanggal 20 Juli 2016 tidak hanya dibacakan di Den Haag, Belanda, juga ditayangkan di Jakarta. Di dalam hasil laporan sidang IPT 1965, disebutkan bahwa Indonesia melakukan genosida. Setelah diselenggarakannya IPT 1965, sejarah yang selama ini luput di mata dunia akhirnya naik ke permukaan. Banyak media-media internasional yang menyoroti IPT 1965 selama berlangsungnya sidang dan pembacaan hasil sidang. Kesuksesan film “*The Act of Killing*” atau “Jagal” dan “*The Look of Silence*” atau “Senyap” oleh Joshua Oppenheimer juga mengambil andil dalam penyorotan kasus genosida pasca Gestapu. IPT 1965 meminta agar pemerintah Indonesia melakukan rekomendasi-rekomendasi yang diajukan untuk mencari kebenaran dari kesimpangsiuran sejarah berkaitan Gestapu, meminta maaf kepada para korban, dan rehabilitasi korban. Bilamana hal-hal tersebut tidak segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka IPT 1965 akan mengangkat kasus ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) karena hasil IPT 1965 tidak mengikat secara hukum. Patut dicatat pula bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) sehingga akan memalukan bila Indonesia tidak bertindak. Media massa di Indonesia pun turut memberitakan perkembangan IPT 1965, salah satunya adalah portal berita *Cable News Network* Indonesia (CNN Indonesia) yang membuat liputan khusus (lipsus) membahas pengadilan rakyat internasional ini.

¹⁷ *Ibid.*

1.2. Identifikasi Masalah

Gestapu sering dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu sejarah kelam di Indonesia, terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Gestapu. Selama masa Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto, masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung berafiliasi dengan PKI diburu, ditangkap, diasingkan, ditahan, dan dihilangkan nyawanya. Putusan sidang IPT 1965 menyatakan bahwa Indonesia melakukan genosida dan IPT mendorong Indonesia untuk mencari kebenaran sejarah Gestapu, serta meminta maaf, dan melakukan rehabilitasi bagi korban.

Pada tahun 2015 sampai dengan 2016, pemberitaan mengenai komunisme dan PKI kembali muncul karena rilisnya film dokumenter yang disutradari oleh Joshua Oppenheimer dan adanya IPT 1965. Contohnya, gelaran *Ubud Writers and Readers Festival 2015* di Bali yang menyelenggarakan diskusi film “*The Look of Silence*” atau “Senyap”, serta beberapa program diskusi panel yang membahas pengalaman penulis, editor, atau penerjemah mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Gestapu, PKI, dan pasca Gestapu, seperti “*1965, Bali*” atau “*1965, Bearing Witness*”.¹⁸ Meskipun, pembahasan kasus yang berkaitan dengan Gestapu dilarang oleh pemerintah daerah dan diberhentikan oleh aparat kepolisian setempat.¹⁹ Media sosial dan media massa diramaikan dengan ulasan dan tanggapan dari dunia internasional mengenai film dokumenter tersebut dan hasil putusan sidang. Media massa Indonesia pun turut

¹⁸ “*Ubud Writers & Readers Festival 2015 Program Book*,” Yayasan Mudra Swari Saraswati, diakses pada 13 Maret 2017, https://issuu.com/uwrf/docs/uwrf_2015_final-17sept-a, hlm. 18-20, 39, 48-49.

¹⁹ Rinaldy Sofwan Fakhrena, “Larangan Diskusi Kasus 1965 Dikecam, RI Disebut Kembali Orba,” *CNN Indonesia*, diakses pada 12 Maret 2017, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151025132353-20-87163/larangan-diskusi-kasus-1965-dikecam-ri-disebut-kembali-orba/>

memberitakan keduanya, namun hanya beberapa media saja. Segelintir media bahkan membuat liputan khusus yang berkaitan dengan IPT 1965 dan Gestapu, seperti *Kompas*, *Tempo*, dan *Jakarta Post*, termasuk diantaranya adalah *CNN Indonesia*. Sesuai dengan latar belakang penelitian, masalah yang akan dikemukakan adalah pemberitaan *CNN Indonesia* dalam menuliskan sidang IPT 1965 yang digelar pada November 2015, kemudian pembacaan hasil putusan sidang pada Juli 2016. Liputan khusus yang ditulis oleh wartawan *CNN Indonesia* dimuat dan disebar, tidak hanya melalui situs web *cnnindonesia.com*, juga laman Facebook dan Twitter. Berita dan artikel yang berkaitan dengan IPT 1965 banyak dikomentari oleh warganet yang menganggap bahwa pemberitaan yang diwartakan memiliki kesan membuka luka lama dan pro-PKI, terutama tulisan yang dimuat setelah pembacaan hasil putusan sidang pada 2016. Komentar tersebut dilontarkan oleh warganet di laman Facebook milik *CNN Indonesia*.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada portal berita daring *CNNIndonesia.com* dan periode sidang IPT 1965 berlangsung, yaitu sejak Oktober 2015 sampai dengan Juli 2016. Peneliti juga akan membatasi pembahasan mengenai Gestapu, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwa oleh IPT 1965 pasca Gestapu, serta keterlibatan negara-negara lain dalam menghancurkan PKI di Indonesia.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut, “**Bagaimana sudut pandang**

pembingkaiian berita pewartaan *CNNIndonesia.com* mengenai *International People's Tribunal 1965?*”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang *CNNIndonesia.com* dalam memberitakan *International People's Tribunal 1965* dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Penulis akan meneliti keberpihakan *CNN Indonesia* dalam pemberitaan tersebut, apakah kepada IPT 1965, bekas tahanan politik pasca Gestapu, pemerintah Indonesia, atau tidak berpihak dan tunduk kepada peraturan perundangan dan kode etik.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah tulisan ini dapat menjadi referensi dalam kajian hubungan internasional dan dapat membantu penulis lain yang akan melakukan penelitian mengenai isu-isu berkaitan dengan media massa dan Gestapu. Penelitian ini membawa manfaat dalam mengetahui fenomena-fenomena dalam hubungan internasional, serta mendapatkan pengetahuan lebih lanjut mengenai sejarah Indonesia yang dibiarkan.

1.4. Studi Pustaka dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Studi Pustaka

Studi pustaka ini digunakan untuk membantu penulis dalam mencari referensi yang berkaitan. Terdapat beberapa pustaka terkait dengan penelitian yang sedang penulis teliti setelah melalui proses pencarian data. Pustaka pertama, yakni berjudul “Dari Beranda Tribunal: Bunga Rampai Kisah Relawan” yang ditulis oleh para kolega IPT 1965 dan diterbitkan pada Maret 2017.²⁰ Setiap tulisan yang dibuat memuat temuan-temuan dari pengolahan data, kisah hidup, dan perubahan kesadaran dan persepsi sejak tahun 1965, terutama para relawan yang terlibat di dalam tribunal, serta cerita dari Hakim Ketua, jaksa, saksi, mahasiswa, dan aktivis.

Kemudian, pustaka kedua adalah “*Final Report of the IPT 1965: Findings and Documents of the International People’s Tribunal on Crime Against Humanity Indonesia 1965*” yang diterbitkan pada 20 Juli 2016 oleh Yayasan IPT 1965. Putusan akhir ini menuliskan laporan, temuan, dan rekomendasi yang dikemukakan oleh pengadilan rakyat. Selain itu, laporan sidang ini menuliskan sepuluh kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduhkan kepada pemerintah Indonesia rezim Soeharto, yakni pembunuhan, pemenjaraan, perbudakaan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, propaganda kebencian, keterlibatan negara lain, dan genosida. Pada *opening statement*, dituliskan bahwa misi pengadilan rakyat tersebut tak lain adalah untuk mengisi kekosongan sejarah dan mendorong adanya keadilan bagi para korban.²¹

²⁰ Friends of International People’s Tribunal 1965, *Dari Beranda Tribunal: Bunga Rampai Kisah Relawan*, (Bandung: Ultimus, 2017).

²¹ IPT 1965, *Final Report of the IPT 1965: Findings and Documents of the International People’s Tribunal on Crimes against Humanity Indonesia 1965*, (The Hague-Jakarta: Yayasan IPT 1965, 2016), hal. 18.

Pustaka ketiga adalah “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto” yang ditulis John Roosa dan pertama kali diterjemahkan dan diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia bekerja sama dengan Hasta Mitra pada 2008. Buku tersebut pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada 2006 dengan judul “*Pretext for Murder: The 30th September Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia*” oleh University of Wisconsin Press. Buku ini secara komprehensif memberikan argument mengenai fakta-fakta yang terjadi pada rangkaian peristiwa Gestapu. Selain itu, Roosa membeberkan dokumen Supardjo yang menurutnya belum pernah digunakan oleh para peneliti maupun sejarawan. Selain itu, buku ini menjadi referensi pemahaman penulis.

Pustaka terakhir adalah “G30S dan Kejahatan Negara” yang ditulis oleh Siau Giok Tjhan dan diterbitkan oleh Ultimus pada tahun 2015. Buku ini berisi analisa mantan ketua umum Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) Siau Giok Tjhan atas kejadian Gestapu. Berdasarkan pendapat John Roosa, tulisan Siau Giok Tjhan memberikan kesan bahwa ia adalah seorang pengamat, bukan korban, meskipun ia ditahan selama 12 tahun sebagai tahanan politik sejak tahun 1965 sampai dengan 1978. Di dalam buku ini, Siau Giok Tjhan memberikan argumen bahwa PKI tidak terlibat dalam Gestapu berdasarkan lima realita yang ia kemukakan. Ia pun menuliskan pelanggaran-pelanggaran hukum dan HAM yang dilengkapi dengan gambar pendukung.

1.4.2. Kerangka Pemikiran

Ilmu hubungan internasional kerap mengalami berbagai perkembangan, terutama pada aktor dan isu, karena dipengaruhi oleh adanya globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan struktur politik global. Fokus mula-mula di dalam hubungan internasional meliputi isu tradisional meliputi perang dan perdamaian yang melibatkan negara sebagai aktor utama. Kemudian berkembang isu non-tradisional yang mana aktornya bukan terpusat pada negara saja, namun juga aktor non-negara, seperti media massa, organisasi internasional, perusahaan multinasional, gerakan sosial, dan individu.²² Interaksi dalam hubungan internasional dapat berbentuk bilateral, trilateral, multilateral, atau regional yang mana polanya dapat berupa kemitraan, persaingan, atau konflik.²³ Hal ini bermuara pada kenyataan bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan sehingga terjadilah interaksi melalui komunikasi antar aktor.²⁴

Interaksi antar aktor dalam hubungan internasional diperantarai oleh komunikasi. Secara umum, komunikasi merupakan proses pertukaran simbol dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau tindakan. Komunikasi memiliki kategori-kategori khusus yang dibedakan berdasarkan kepada media yang digunakan dan pesan yang disampaikan, yaitu komunikasi politik, budaya, internasional, bisnis, pembangunan, manajemen, dan lain-lain.²⁵ Pada dasarnya,

²² Bob Sugeng Hadiwinata, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, disunting oleh Yulius Purwadi Hermawan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 1.

²³ Margono, "Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Th. 28 Nomor 2* (2015): hal. 108.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mohamad Shoelhi, *Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hlm. 26.

pengertian kategori khusus komunikasi hampir sama dengan definisinya secara umum, hanya dibedakan berdasarkan media yang digunakan atau pesan yang disampaikan.²⁶

Gerard Maletzke menyatakan bahwa komunikasi internasional adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh berbagai negara-bangsa yang melewati batas-batas negara, tercermin dalam diplomasi dan propaganda yang tidak terbatas pada situasi *intercultural* atau antarbudaya, namun menekankan perhatian pada pesan yang bermuatan kebijakan dan kepentingan antar negara terkait dengan isu ekonomi, politik, pertahanan, dan lain sebagainya, akan tetapi komunikasi internasional cenderung mengkaji realitas politik.²⁷ Menurut K. S. Sitaram, komunikasi internasional adalah komunikasi antara struktur-struktur politik yang dilakukan oleh pimpinan negara atau wakilnya dalam upaya diplomasi.²⁸

Komunikasi internasional dapat dipahami melalui empat perspektif, yaitu jurnalistik, diplomatik, propagandistik, kulturalistik, dan bisnis. Di dalam perspektif jurnalistik, media massa memiliki peranan besar karena menjadi alat pertukaran informasi mengenai peristiwa internasional dan jurnalis mampu memengaruhi persepsi yang membentuk opini publik internasional. Komunikasi internasional dalam perspektif ini, dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Meskipun komunikasi internasional bersifat netral dan menghindari sikap memojokkan satu pihak, tetapi ada kemungkinan bahwa perspektif ini digunakan secara subjektif untuk kepentingan propaganda dengan tujuan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hal. 27.

²⁸ *Ibid.*

untuk mengubah kebijakan dan kepentingan suatu negara atau melemahkan posisi negara lain.²⁹

Komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik dilakukan antar pemerintah melalui komunikasi langsung antar pejabat tinggi negara secara interpersonal, kelompok kecil, atau mekanisme organisasi internasional yang bertujuan untuk memperluas pengaruh, meningkatkan komitmen dan solidaritas, menanggulangi perbedaan pendapat dan salah paham, menghindari pertentangan dalam masalah tujuan dan kepentingan, menghindari konflik, mengembangkan kerja sama, dan meningkatkan reputasi.³⁰ Di dalam perspektif propagandistik, tujuan dilakukannya komunikasi internasional adalah untuk menanamkan ide atau gagasan kepada masyarakat internasional sehingga dapat memengaruhi pikiran, rasa, serta tindakan. Tidak hanya itu, tetapi juga untuk mendapatkan dukungan dari negara lain, mengubah cara pandang terhadap suatu gagasan atau kebijakan, melemahkan kebijakan atau program.³¹ Seni budaya kerap digunakan dalam komunikasi internasional dalam perspektif kulturalistik, seperti festival literatur di Ubud, Bali atau Oktoberfest di Jerman, yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya persahabatan, rasa saling menghormati dan percaya, dan menciptakan suasana damai. Akibat positif dari komunikasi internasional adalah terbentuk organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pertukaran antarbudaya, pertukaran pelajar, pendirian pusat kebudayaan, seperti *Institut Française d'Indonesie* (IFI), sedangkan akibat negatifnya, salah satunya adalah tergerusnya budaya lokal karena *pop culture*. Komunikasi internasional pada perspektif bisnis dilakukan oleh pebisnis internasional atau pembuat

²⁹ *Ibid*, hal. 31-32.

³⁰ *Ibid*.

³¹ *Ibid*.

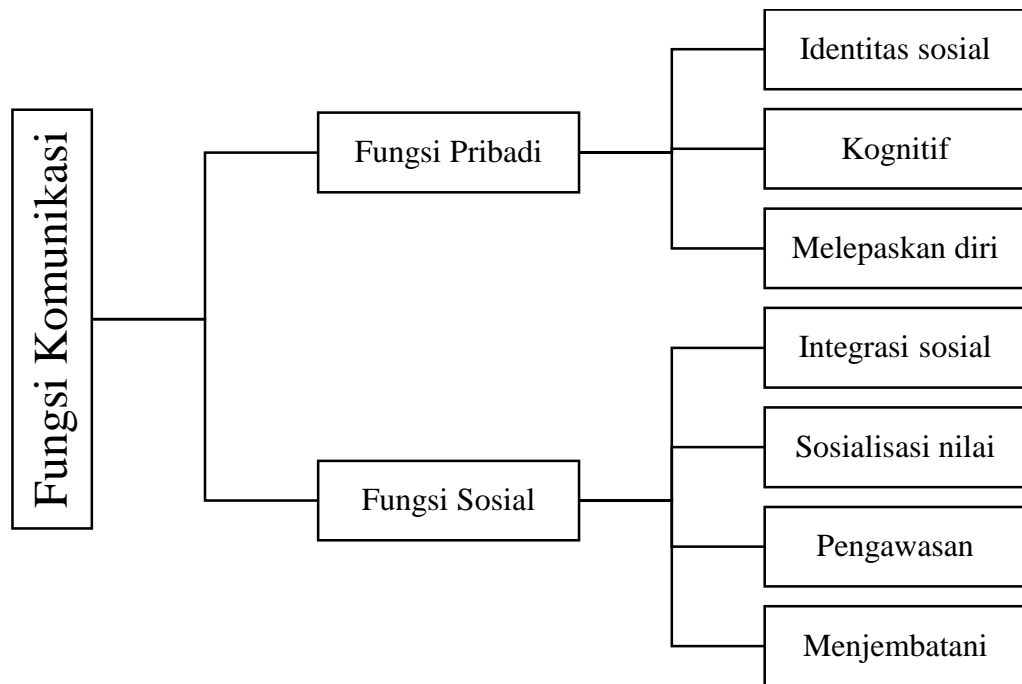
kebijakan untuk meningkatkan kerja sama di bidang industri, ekonomi, dan keuangan yang menyangkut promosi atau transaksi bisnis, biasanya dilakukan melalui pameran atau forum internasional.³²

Fungsi komunikasi internasional dapat dipahami sebagaimana fungsi pada umumnya. Namun, komunikasi internasional terikat pada prinsip hukum dan etika tertentu, yaitu “Saya memperlakukan Anda sebagaimana hukum dan etika internasional memperlakukan Anda dan bukan sebagaimana yang saya kehendaki.”

Sebelum membahas mengenai fungsi komunikasi internasional yang lebih spesifik, maka harus memahami secara umum. Dadan Anugrah dan Winny Kresnowati menguraikan fungsi-fungsi komunikasi yang dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu pribadi dan sosial.³³ Identitas sosial, kognitif, dan melepaskan diri merupakan bagian dalam fungsi pribadi. Sedangkan integrasi sosial, sosialisasi nilai, pengawasan, dan menjembatani termasuk ke dalam fungsi sosial.

³² *Ibid.*

³³ Dadan Anugrah dan Winny Kresnowati, *Komunikasi Antar Budaya* (Jakarta: Jala Permata, 2008).



Gambar 1 sumber: Dadan Anugrah dan Winny Kresnowati, *Komunikasi Antar Budaya* (Jakarta: Jala Permata, 2008)

Pertama, melalui komunikasi, identitas diri dan sosial seseorang dapat diketahui melalui tindakan verbal dan non-verbal. Misalnya, seseorang berbahasa India dan menggunakan sari, berarti ia berbangsa India. *Kedua*, fungsi kognitif dari komunikasi adalah memperkaya pengetahuan seseorang melalui interaksi dengan orang lain. Lalu, maksud dari fungsi melepaskan diri adalah berkomunikasi dengan orang lain, seseorang dapat mengagih masalah, menghapus kesedihan, berbagi kebahagiaan, atau mengurangi ketegangan. Kemudian, esensi dari integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan, namun tetap menerima perbedaan yang dimiliki oleh tiap orang di dalam kelompok sosial. *Kelima*, sosialisasi nilai memiliki bentuk yang hampir mirip dengan fungsi kognitif. Namun dalam hal ini, interaksi yang dilakukan berupa penyebaran nilai, biasanya penyebaran dilakukan oleh satu atau sekelompok orang ke khalayak atau

masyarakat. Misalnya, dalam sebuah pertunjukan tari Legong, terdapat nilai-nilai yang ditransformasikan kepada para penonton. *Keenam*, fungsi lain komunikasi adalah melakukan pengawasan untuk menyebarkan informasi perkembangan lingkungan sosial, meskipun hal ini lebih sering diperankan oleh media massa daripada masyarakat. Terakhir, fungsi komunikasi dalam menjembatani perbedaan antar komunikator yang keliru menafsirkan pesan sehingga dapat menjalin hubungan baik melalui simbol atau bahasa yang maknanya sama. Pada pokoknya, komunikasi internasional berfungsi untuk mendinamisasikan hubungan internasional antara dua atau lebih negara di berbagai bidang.

Sarana dalam melakukan komunikasi internasional adalah dengan media. Sejak terjadinya *media boom* pada dekade 80 sampai 90-an sebagai akibat dari kesejahteraan ekonomi, media massa berkembang pesat, yakni surat kabar, majalah, radio, dan televisi.³⁴ Perkembangan media massa berjalan linear dengan perkembangan teknologi. Globalisasi pun memengaruhi jangkauan media massa yang semula hanya wilayah kecil negara, seperti kota, menjadi semakin luas sejak akhir abad 20 yang mana teknologi semakin mutakhir sehingga berkembang sebutan '*old media*' dan '*new media*'. Perkembangan teknologi media baru disebut sebagai faktor penting globalisasi, bahkan dinyatakan sebagai '*the death of distance*'.³⁵ Namun, apa yang dinilai sebagai *old* atau lama dan *new* atau baru. Sonia Livingstone mengemukakan bahwa perlu diidentifikasi 'apa yang baru bagi masyarakat terkait *new media*?'³⁶ Namun, sebelum membahas

³⁴ Arie Indra Chandra, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, disunting oleh Yulius Purwadi Hermawan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 240.

³⁵ Terry Flew, *New Media: An Introduction, Second Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hal. 179.

³⁶ *Ibid.*, hal. 2.

mengenai *new media*, juga perlu mengerti apa yang dimaksud dengan media. Media merupakan bentuk plural dari kata ‘medium’ yang dapat diartikan sebagai alat, instrumen, sarana, forum, ruang, atau perantara pesan.³⁷ Media merupakan segala bentuk sarana *broadcasting* dan *narrowcasting*, seperti koran, majalah, televisi, radio, papan iklan atau *billboard*, telepon, faksimile, dan internet.³⁸

Media massa pada abad ke-21 tidak hanya media cetak, televisi, atau radio, tetapi juga portal berita di *world wide web* atau internet. Di dalam hubungan internasional disebut sebagai “*Web 2.0*”.³⁹ Dalam sebuah jurnal mengenai Web 2.0 menuliskan bahwa revolusi internet disebabkan oleh perkembangan komunikasi global dan perkembangan teknologi. Jurnal yang ditulis oleh Nicholas Westcott itu menyebutkan mengenai internet yang menghapuskan batas-batas dalam penyebaran informasi sehingga informasi melimpah dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam berbagai forum diskusi.⁴⁰ Media massa harus menyajikan informasi yang transparan, tidak memihak, dan akuntabel.

New media atau media baru sering dipahami sebagai penggunaan komputer sebagai upaya distribusi daripada produksi.⁴¹ Maksudnya adalah bahwa seluruh sarana

³⁷ Martin Lister, Jon Dovey, et al., *New Media: A Critical Introduction, Second Edition* (New York: Routledge, 2009), hal. 26.

³⁸ Mirjami Sipponen-Damonte, “*Internal Communications through New Media*,” (Master’s thesis, Aalto University School of Business, 2013).

³⁹ Charli Carpenter dan Daniel W. Drezner, “International Relations 2.0: The Implications of New Media for an Old Profession,” *International Studies Perspective* (2011): 255-272, <http://www.danieldrezner.com/research/ir2.0.pdf>, diakses pada 15 Februari 2017.

⁴⁰ Nicholas Westcott, “Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations,” Oxford Internet Institute, 2008, <https://www.oii.ox.ac.uk/archive/downloads/publications/RR16.pdf>, diakses pada 16 Februari 2017.

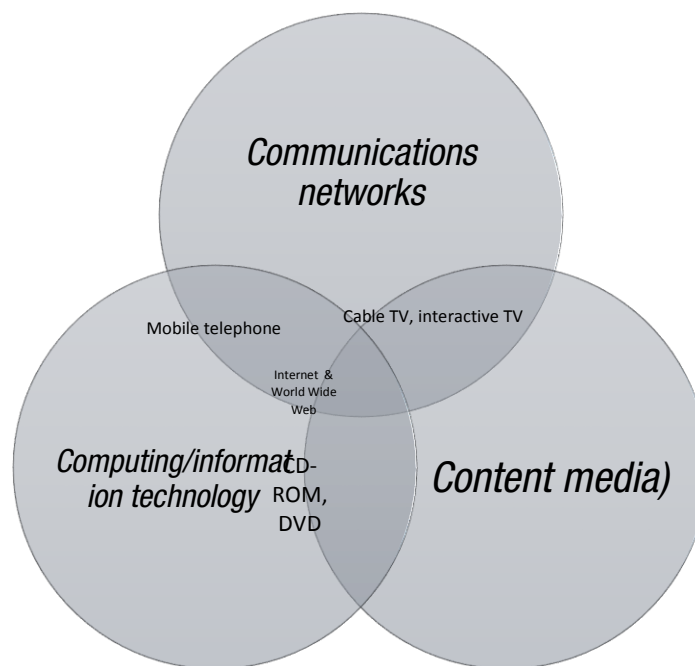
⁴¹ Lev Manovich, “What New Media is Not,” di dalam *The Language of New Media* (Massachusetts: MIT Press, 2001), hal. 49–61.

komunikasi yang disebarkan melalui media komputer, seperti situs atau buku elektronik, disebut sebagai *new media*. Sarana komunikasi yang dimaksud antara lain, teks, *still images* atau foto, *moving images* atau video, suara, dan konstruksi spasial. *New media* juga dapat disebut sebagai *digital media* atau media digital.

Media baru dapat dipahami sebagai sarana komunikasi yang memiliki gabungan dari 3C, yaitu *computing and information technology* atau komputerisasi dan teknologi informasi, *communication networks* atau jaringan komunikasi, dan *digitised media and information content* atau media digital dan konten informasi.⁴² Sedangkan, Lievrouw dan Livingstone menyebutkan bahwa media baru perlu memperhitungkan tiga elemen, yaitu perangkat yang mampu memperluas jaringan komunikasi, aktivitas komunikasi yang dilakukan dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat tersebut, dan organisasi dan pengaturan sosial yang terbentuk di sekitar perangkat dan aktivitas komunikasi.⁴³ Berikut ini merupakan gambar mengenai 3C:

⁴² Terry Flew, *Op.Cit.*

⁴³ *Ibid.*



Gambar 2 sumber: Terry Flew, New Media: An Introduction, 2nd Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hal. 3.

Batas antara media lama dan baru sulit dijelaskan karena yang termasuk ke dalam media baru, seperti berbagai situs di World Wide Web, kerap kali rekombinan karena berasal dari konten media yang sudah ada (teks cetak, foto, film, rekaman musik, atau televisi), namun dikembangkan dan diproduksi ulang dalam format digital.⁴⁴ Perkembangan media baru tidak hanya melibatkan kemunculan pemain baru, namun juga media tradisional yang menghadirkan dirinya dalam bentuk digital dan meninjau kembali produk yang sudah ada.⁴⁵

Kini, media massa cetak merambah ke media digital. Sehingga, selain mempublikasikan berita melalui media cetak, namun juga melalui media baru pada dunia

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 4.

⁴⁵ *Ibid.*

siber. Bila dibandingkan dengan media cetak, pergerakan media siber jauh lebih cepat. Bahkan, peristiwa yang saat itu terjadi bisa langsung diberitakan hanya dalam hitungan jam bahkan menit. Oleh karena itu, pembingkaiannya suatu berita dapat dilihat dengan lebih saksama karena tuntutan untuk mempublikasikan warta secara cepat dan tepat. Maka, penelitian ini menggunakan analisis *framing* untuk mengetahui pembingkaiannya berita yang dilakukan oleh media massa.

Analisis *framing* merupakan sebuah metode dalam analisis media dalam membingkai sebuah peristiwa untuk mengetahui sudut pandang yang digunakan oleh jurnalis atau media massa dalam penyeleksian isu dan penulisan berita.⁴⁶ Metode ini digunakan untuk dalam mengkaji pembingkaiannya realitas peristiwa oleh media yang sudah melalui proses rekonstruksi.⁴⁷ Robert Entman menyebutkan bahwa di dalam *framing* terjadi proses pembingkaiannya seleksi terhadap aspek pemahaman realitas atau peristiwa dan membuatnya lebih tersorot dalam penyampaian teks. Proses ini meliputi terjadinya *problem definition* yang mana media harus menjelaskan duduk permasalahan, *causal interpretation* atau mengidentifikasi akar persoalan, *moral evaluation* atau membuat pertimbangan dengan menilai berbagai dampak, dan memberikan pendapat dalam penyelesaian masalah atau *treatment recommendation*.⁴⁸

Sedangkan, Pan dan Konsicki menjelaskan *framing* sebagai suatu strategi konstruksi dan pemrosesan berita yang terdiri dari dua konsep yang saling berhubungan, yakni *pertama*, konsep psikologi yang menyebutkan bagaimana individu memproses dan

⁴⁶ Alex Sobur, *Analisis Teks Media* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 4.

⁴⁷ Rachmat Kriyantoro, *Teknik Praktisi Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

⁴⁸ Robert Entman, "Framing toward Clarification of a Fractured Paradigm," *Journal of Communication* (43) 4, Autumn, hal. 53.

mengolah informasi ke dalam dirinya yang ditunjukkan ke dalam skema, *kedua*, konsep sosiologis yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan suatu peristiwa berdasarkan pada sudut pandangnya sehingga dapat disebutkan bahwa konsep ini melihat proses internal seseorang.⁴⁹ Perangkat *framing* dibagi ke dalam empat dimensi struktural, yaitu struktur sintaksis, naskah atau *script*, tematik, dan retorik.⁵⁰ Struktur sintaksis berhubungan dengan cara jurnalis menyusun fakta atau peristiwa ke dalam berita. Dalam meneliti struktur dapat diamati melalui kepala berita atau *headline*, *lead*, latar, kutipan, pernyataan, dan penutup. Kemudian, struktur naskah merupakan cara jurnalis menuliskan atau menceritakan peristiwa ke dalam berita yang mengandung unsur 5W + 1H atau *what* (siapa), *where* (di mana), *when* (kapan), *why* (mengapa), *who* (siapa), dan *how* (bagaimana). Ketiga, struktur tematik, yakni cara jurnalis menyampaikan fakta ke dalam proposisi atau kalimat dengan unsur detail, koherensi dan bentuk kalimat, dan kata ganti. Keempat, struktur retorik adalah cara jurnalis dalam menyoroti dan menekankan fakta dalam mendukung tulisan dengan penggunaan gambar atau foto, grafis, atau idiom yang memiliki unsur leksikon dan metafora.

Kemudian, penelitian ini pun menggunakan paradigma post-positivisme untuk memberikan perspektif-perspektif anyar mengenai rangkaian peristiwa yang sebelumnya ditutupi oleh suatu rezim. Dalam menjelaskan post-positivisme, perlu adanya pemahaman mengenai positivisme karena keduanya memiliki keterkaitan. Post-positivisme menolak prinsip utama positivisme, yakni penolakan terhadap metafisika. Metodologi dalam post-positivisme menggunakan pemahaman bahwa manusia memahami dan membangun

⁴⁹ Eriyanto, *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal. 252.

⁵⁰ *Ibid.*

dunia, termasuk dunia internasional yang sepenuhnya merupakan konstruksi manusia.⁵¹ Post-positivisme berangkat dari kaum konstruktivis yang mengkritik kehadiran positivisme yang mengilmiahkan ilmu hubungan internasional, sedangkan positivisme muncul dari kaum behavioralis.

Positivisme menekankan bahwa fenomena hubungan internasional dapat dijelaskan secara saintifik dan dapat diprediksi hal-hal yang akan terjadi ke depannya melalui rumus tertentu. Maka, positivisme itu sendiri berdiri sebagai penelitian yang kuantitatif di mana data-data statistik atau survey diperlukan untuk menjelaskan suatu fenomena hubungan internasional. Oleh karena itu pula, paradigma positivisme menekankan objektivitas para peneliti.

Sebaliknya, post-positivisme beranggapan bahwa fenomena sosial dalam hubungan internasional tidak dapat begitu saja dijelaskan atau dilihat sebatas observasi yang bersifat saintifik. Hal ini dikarenakan analisa fenomena hubungan internasional diterjemahkan berdasarkan interpretasi masing-masing peneliti (intertekstual) dalam mengelola pengambilan data sehingga terdapat subjektivitas.

Kemudian, kaum post-positivis juga menekankan bahwa teoretikus hubungan internasional terintegrasi ke dalam dunia yang dipelajari.⁵² Maka, teoretikus tersebut bukanlah orang luar, melainkan orang dalam yang membuat asumsi dan gambar dari konteks realita, ilmu pengetahuan bukan dan tidak bisa bertindak netral.⁵³

⁵¹ Robert Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches 4th Edition* (New York: Oxford University Press, Inc., 2010), hal. 286.

⁵² Robert Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches 5th Edition* (Italia: Oxford University Press, Inc., 2013), hal. 232.

⁵³ *Ibid.*

Selain itu, ilmu sains tidak bisa disamaratakan dengan ilmu sosial yang menyangkut perilaku manusia di dalamnya. Pada dasarnya, perilaku manusia tidak dapat diprediksi secara mutlak karena hidup secara dinamis. Oleh karena itu, penggunaan metode saintifik untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena sosial bisa saja meleset.

Pendekatan yang termasuk ke dalam post-positivisme, yakni *critical theory*, post-modernisme, teori normatif,⁵⁴ post-strukturalisme, post-kolonialisme, dan feminisme.⁵⁵

1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan mengandalkan kemampuan analisis. Umumnya, penelitian kualitatif digunakan dalam studi Hubungan Internasional karena bersifat idiografik, cenderung objektif, dan historis.⁵⁶ Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam ke dalam peristiwa, tempat, organisasi, dan kepribadian yang lebih spesifik.⁵⁷

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data melalui data-data primer dan sekunder sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Data primer yang digunakan adalah informasi yang

⁵⁴ Robert Jackson dan Georg Sørensen, 2010, *Op.cit.*, hal. 296.

⁵⁵ Robert Jackson dan Georg Sørensen, 2013, *Op.cit.* hal. 248.

⁵⁶ Jack S. Levy, "Qualitative Methods in International Relations, dalam Harvey, Frank P. & Brecher, Michael (ed), *Evaluating Methodology in Internatinal Studies* (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2002), hal. 131-160.

⁵⁷ Christopher Lamont, "Research Methods in International Relations," *Sage Pub* (2015): 3-29, https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/71316_Lamont_Research_Methods_in_International_Relations_Chapter_1.pdf

dipublikasikan oleh media yang disebutkan dalam penelitian, yaitu *CNN Indonesia*. Selain itu, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Yayasan IPT 1965 dan *Central Intelligence Agency (CIA)*. Sedangkan data sekunder, didapatkan melalui jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sehingga dapat dikontraskan dengan teori yang sudah ditentukan.

1.6. Sistematika Pembahasan

Penulis akan membagi penelitian ini ke dalam empat bab dengan gambaran umum, sebagai berikut:

Bab I, menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah yang terdiri dari pembahasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab II, membahas Gestapu yang dilihat dari berbagai sisi, yaitu pemerintah, militer, akademisi, Amerika Serikat, dan masyarakat. Kemudian, menjelaskan bagaimana IPT 1965 melihat kejadian Gestapu dan posisi IPT 1965 sebagai tribunal partikelir. Terakhir, akibat dari Gestapu dilihat dari berbagai perspektif sejarah.

Bab III, membahas mengenai *CNN Indonesia* sebagai media pemberitaan nasional yang meliputi peran dan tanggung jawab jurnalis, kode etik jurnalis, pedoman pemberitaan media siber, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Serta, menganalisis IPT 1965 dan bagaimana *CNN Indonesia* melihat posisi IPT 1965.

Bab IV, menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bab ini, penulis akan mengetahui dan memahami bagaimana pembingkaiian berita yang dilakukan oleh *CNNIndonesia.com*.